

KOMPARASI BENTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DESA WISATA NGLANGGERAN DAN PENTINGSARI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh

Mahmudah Budiatiningsih¹ & Bintari Pangesti Putri²

¹Program Studi D3 Pariwisata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

²Program Studi D-4 Destinasi Pariwisata, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: ¹Mahmudahb@unram.ac.id & ²bintari.putri@polban.ac.id

Article History:

Received: 21-09-2025

Revised: 22-10-2025

Accepted: 25-10-2025

Keywords:

Pemberdayaan

Masyarakat, Desa

Wisata, Desa

Nglanggeran, Desa

Pentingsari.

Abstract: *Desa Nglanggeran dan Pentingsari merupakan contoh desa wisata di DIY yang berhasil menerapkan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk pemberdayaan masyarakat yang diterapkan pada kedua desa tersebut sebagai contoh implementasi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Jenis penelitian ini berupa kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif. Teknik pengambilan data dilakukan melalui survei, wawancara, studi literatur dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pemberdayaan masyarakat pada tahap perencanaan menunjukkan perbedaan dalam identifikasi masalah. Sementara identifikasi potensi pengembangan kedua desa memiliki kesamaan yaitu dilakukan oleh pengelola dan masyarakat namun dengan proses yang berbeda. Bentuk pemberdayaan masyarakat pada tahap pelaksanaan menunjukkan kesamaan pada keterlibatan pengelola, tetapi terdapat perbedaan pengelolaan usaha. Bentuk partisipasi masyarakat dalam menerima manfaat menunjukkan kesamaan antara kedua desa. Perbedaan ditemukan pada tingkat partisipasi masyarakat di antara Desa Nglanggeran dan Desa Pentingsari.*

PENDAHULUAN

Ujung tombak pencapaian kesejahteraan rakyat di Indonesia adalah pembangunan desa, sedangkan tujuan pembangunan desa antara lain untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa [1]. Pembangunan desa dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya berupa program pemberdayaan masyarakat desa melalui sektor pariwisata. Dalam Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata melalui Desa Wisata (2010), pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan [2].

Desa wisata menjadi target program PNPM Mandiri pariwisata karena bentuk pengembangan desa wisata bisa mengintegrasikan antara elemen atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat dan menyatu dengan tata cara serta tradisi yang berlaku [2]. Melalui skema pengembangan desa wisata,

peluang masyarakat setempat untuk mengambil peran dalam pengembangan pariwisata sangat besar. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan pariwisata memerlukan upaya pemberdayaan agar masyarakat dapat berperan secara aktif dan optimal sehingga bisa menjadi subyek pengembangan pariwisata sekaligus sebagai penerima manfaat dari pelaksanaan pariwisata [3].

Salah satu wilayah di Indonesia yang menggunakan pariwisata sebagai alat pembangunan daerah yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pariwisata menjadi satu dari 3 pilar utama pembangunan DIY bersama pendidikan dan kebudayaan. Nugraha yang merupakan Kabid Pengembangan Destinasi Wisata Provinsi DIY menambahkan bahwa pendekatan pengembangan pariwisata di DIY menggunakan konsep pariwisata berbasis masyarakat yang meletakkan masyarakat sebagai pelaku aktif pengembangan pariwisata. Pendekatan ini juga ditemukan dalam pengembangan desa wisata dimana salah satu prinsip pengembangan desa wisata adalah melibatkan masyarakat setempat [4].

Jumlah desa wisata layak jual di DIY berjumlah 135 desa wisata, terdiri dari 48 desa wisata tumbuh/embrio, 39 desa wisata berkembang, dan 48 desa wisata maju [5]. Masing-masing klasifikasi desa wisata memiliki kondisi pengembangan yang berbeda. Dari 135 desa wisata, terdapat 2 desa wisata yang berhasil menunjukkan perkembangan yang sangat baik yaitu Desa Wisata Pentingsari dan Desa Wisata Nglanggeran. Kedua desa wisata tersebut sering menjadi desa wisata percontohan di Indonesia. Bahkan pada tahun 2019, 2 desa tersebut termasuk dalam Top 100 Green Destinations bersama 2 desa wisata di Bali [12]. Desa wisata Pentingsari dan Nglanggeran dinilai sebagai desa wisata yang berkelanjutan. Dalam pengelolaan desa wisata, kedua desa tersebut menerapkan pengelolaan berbasis masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi program yang tidak terpisahkan dalam pengembangan pariwisata di kedua desa tersebut. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang diterapkan di Desa Wisata Nglanggeran dan Pentingsari sebagai contoh implementasi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata.

LANDASAN TEORI

Desa Wisata

Desa wisata diartikan sebagai suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku [2]. Sedangkan dalam Dinas Pariwisata DIY (2014), desa wisata didefinisikan sebagai suatu wilayah dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan termasuk tumbuhnya fasilitas akomodasi yang disediakan oleh masyarakat setempat [4]. Desa wisata dalam konteks wisata pedesaan disebut sebagai aset kepariwisataan berbasis potensi desa dengan berbagai keunikan yang bisa menjadi daya tarik wisata [4]. Desa wisata berbeda dengan pengertian desa sebagai batas administratif. Desa wisata sama halnya dengan destinasi wisata. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan [6]. Berdasarkan definisi

tersebut, desa wisata bisa terdiri dari satu wilayah administrasi desa secara utuh, sebagian atau justru lebih dari satu desa.

Sebuah desa setidaknya harus memiliki beberapa karakteristik sehingga bisa dikembangkan sebagai desa wisata. Karakteristik desa wisata yaitu: 1) adanya potensi produk/obyek dan daya tarik wisata yang unik dan khas, 2) tingkat penerimaan dan komitmen yang kuat dari masyarakat setempat, 3) potensi SDM lokal yang mendukung, 4) peluang akses terhadap pasar wisatawan, dan 5) ketersediaan area/ruang untuk pengembangan fasilitas pendukung wisata [4]. Kelima poin tersebut menjadi modal dasar dalam pengembangan desa wisata. Dalam pengembangan pariwisata perlu dikontrol agar tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat setempat khususnya karena masyarakat terintegrasi secara langsung dalam suatu desa wisata. Agar pengembangan desa wisata bisa mendorong tercapainya tujuan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, pengembangan dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip dasar pengembangan desa wisata yaitu: 1) tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat desa setempat, 2) pembangunan fisik ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa, 3) memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian, 4) memberdayakan masyarakat desa wisata, dan 5) memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta berwawasan lingkungan [4].

Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan KBBI, “pemberdayaan” berarti menjadikan berdaya, sementara “berdaya” berarti berkekuatan; berkemampuan; bertenaga atau mempunyai akal untuk mengatasi sesuatu. Maka secara harfiah pemberdayaan bisa diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan. Pemberdayaan diartikan sebagai proses yang terencana dan sistematis, yang dilaksanakan secara berkesinambungan, baik bagi individu atau kolektif, guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri sendiri sehingga mampu melakukan transformasi sosial [7]. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, maka pemberdayaan dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat [1]. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya [7]. Dalam pemberdayaan masyarakat harus berpedoman pada prinsip kesetaraan, partisipatif, keswadayaan dan berkelanjutan [7].

Pemberdayaan Masyarakat melalui Pariwisata

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai program, termasuk salah satunya melalui pengembangan pariwisata. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

yang mengatur bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa [1]. Dalam sektor pariwisata, sumber daya alam maupun keunikan lainnya yang dimiliki sebuah desa menjadi daya tarik. Pariwisata yang berbasis potensi dan keunikan desa seperti ini dikenal dengan desa wisata [4].

Menurut Dinas Pariwisata DIY (2014), pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh pihak pengelola desa wisata diterapkan dalam bidang atraksi, akomodasi, penyiapan SDM yaitu: 1) pertemuan/serasehan, 2) pendampingan, 3) bantuan modal, 4) pembangunan sarana dan prasarana, 5) pembentukan organisasi desa wisata, 6) kerja bakti, dan 7) pemasaran [4]. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengembangan pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan potensi wilayah setidaknya berdasarkan pada beberapa kriteria yaitu: 1) memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal; 2) meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan secara merata pada penduduk lokal; 3) berorientasi pada pengembangan wirausaha berskala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga kerja besar dan berorientasi pada teknologi kooperatif; dan 4) memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai penyumbang tradisi budaya dengan dampak negatif yang seminimal mungkin.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat lokal terkait pengembangan pariwisata, keterlibatan masyarakat dapat diimplementasikan dalam 3 hal, yaitu pada tahap perencanaan (planning stage), tahap implementasi atau pelaksanaan (implementation stage), dan tahap penerimaan manfaat atau keuntungan (share benefits) baik secara ekonomi maupun sosial budaya.

- 1) Pada tahap perencanaan, keterlibatan masyarakat lokal dilakukan melalui partisipasi dalam identifikasi masalah sebelum pengembangan pariwisata; identifikasi potensi pengembangan baik dari aspek daya tarik maupun fasilitas serta perencanaan alternatif pengembangan lainnya, dsb.
- 2) Pada tahap implementasi, keterlibatan masyarakat dilakukan melalui partisipasi dalam pelaksanaan program pengembangan yang telah ditetapkan, pengelolaan destinasi atau usaha yang berkaitan dengan kegiatan wisata, dsb.
- 3) Pada aspek penerimaan manfaat, bentuk keterlibatan masyarakat terwujud dalam peran dan posisi masyarakat dalam memperoleh nilai manfaat baik secara ekonomi maupun sosial budaya, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di 2 desa wisata di DIY, yaitu Desa Wisata Nglanggeran dan Desa Wisata Pentingsari. Desa Wisata Nglanggeran terletak di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Sementara Desa Wisata Pentingsari terletak di Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Desa Wisata Nglanggeran secara administrasi meliputi satu desa yaitu Desa Nglanggeran dan terdiri atas 5 padukuhan/dusun yaitu Dusun Nglanggeran Kulon, Dusun Nglanggeran Wetan, Dusun Gunungbutak, Dusun Karangsari, dan Dusun Doga. Jumlah penduduk desa adalah 2.613 orang yang terdiri atas 812

KK dengan luas lahan 762,0990 ha. Sementara pusat kegiatan wisata masih terpusat di 3 padukuhan yaitu Dusun Nglanggeran Kulon, Dusun Nglanggeran Wetan, dan Dusun Gunungbutak [8]. Desa Wisata Pentingsari terletak di Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Cakupan Desa Wisata Pentingsari merupakan padukuhan dengan luas wilayah 103 ha. Jumlah penduduk di Desa Wisata Pentingsari adalah 339 jiwa yang terdiri atas 122KK. Pentingsari merupakan 1 dari 9 padukuhan di Desa Umbulharjo [9].

Teknik Pengambilan Data dan Analisis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif. Penelitian yang dilakukan berupa pengamatan kehidupan masyarakat dan interaksi sosial yang terjadi, sehingga pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif dianggap sesuai [10]. Sementara analisis dilakukan secara deskriptif dengan mendeskripsikan kondisi yang ditemukan di lapangan. Pendekatan komparatif digunakan untuk menyajikan data dengan membandingkan dua obyek yang diteliti. Metode pengambilan data dilakukan melalui survei, wawancara, studi literatur dan studi dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan membandingkan data temuan di lapangan dengan teori pemberdayaan masyarakat. Hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif dengan membandingkan bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat antara Desa Wisata Nglanggeran dan Pentingsari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Singkat Desa Wisata Nglanggeran

Desa Wisata Nglanggeran pada mulanya memiliki single product berupa Gunung Api Purba (GAP) dan baru diresmikan menjadi desa wisata pada 2008 melalui SK Kepala Dinas Pariwisata. Daya tarik utama Desa Nglanggeran berupa GAP dan Embung Nglanggeran. Sementara daya tarik pendukung terdiri atas berbagai jenis atraksi wisata budaya seperti keberadaan Kampung Pitu sebagai kampung adat yang masih terjaga, kesenian karawitan; paket live in, paket edukasi, paket cinta lingkungan, dsb. Desa Nglanggeran juga telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kegiatan pariwisata seperti adanya lahan parkir, toilet, gazebo, loket, ketersediaan kantor pengelola, pemandu tersertifikasi, toko oleh-oleh, dan homestay. Penyediaan fasilitas dilakukan oleh masyarakat secara swadaya, berasal dari bantuan pemerintah atau program CSR dari pihak swasta. Pengelolaan pariwisata Desa Nglanggeran dikelola sepenuhnya oleh masyarakat melalui Pokdarwis yang dibentuk secara musyawarah. Pelaksana kegiatan dilakukan oleh pemuda karang taruna. Sedangkan masyarakat secara luas terlibat dalam berbagai pos usaha yang mendukung kegiatan pariwisata. Penduduk yang pada mulanya merupakan golongan miskin yang hanya bergantung pada pertanian musiman, kini sudah banyak yang bergabung dalam kegiatan wisata tanpa meninggalkan pekerjaan utama.

Profil Singkat Desa Wisata Pentingsari

Desa Wisata Pentingsari terletak di Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Lokasinya yang berada di lereng Gunung Merapi, menjadikan desa ini memiliki pemandangan alam yang indah dan suasana pedesaan yang sejuk. Berbeda dengan Desa Nglanggeran, Desa Pentingsari memiliki daya tarik utama berupa potensi budaya dan alam khas pedesaan serta dilengkapi dengan berbagai kegiatan edukatif. Dalam penyediaan fasilitas, Desa Pentingsari juga telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pariwisata seperti lahan parkir yang cukup besar, homestay, sekretariat pengelola, camping ground, dan

toko oleh-oleh. Pengelolaan pariwisata Desa Pentingsari dilakukan oleh Pokdarwis bersama masyarakat setempat. Sama seperti di Desa Nglanggeran, Desa Pentingsari juga memiliki penduduk yang mayoritas merupakan petani. Masyarakat yang tergabung dalam kegiatan pariwisata tidak lantas meninggalkan pekerjaan utama mereka, sehingga pariwisata menjadi sumber pendapatan alternatif bagi mereka.

Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran dan Pentingsari

Pemberdayaan Masyarakat dalam Tahap Perencanaan

1) Partisipasi dalam Identifikasi Masalah

Pariwisata di Desa Nglanggeran dirintis oleh masyarakat terutama pemuda karang taruna. Pada mulanya, para pemuda mengalami keresahan akibat ancaman kekeringan di Desa Nglanggeran saat musim kemarau. Kondisi ini semakin memperparah kondisi penduduk desa yang mayoritas merupakan penduduk miskin yang bergantung pada sektor pertanian. Pada musim kemarau, masyarakat terpaksa menebang pohon dan mengambil bebatuan di kawasan GAP untuk dijual. Pemuda karang taruna Bukit Putra Mandiri yang menyadari permasalahan ini bersama-sama menyusun rencana untuk melakukan upaya konservasi dengan penanaman banyak pohon di GAP. Pada tahun yang sama yaitu 1999, karang taruna memperoleh kepercayaan pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan atas kawasan GAP seluas 48 ha. Selain untuk mencegah kekeringan dengan menjaga debit air, kegiatan tersebut berhasil menjadikan kawasan GAP terlihat hijau dan tidak lagi gersang. Pada saat yang bersamaan, pemuda karang taruna secara bertahap terus mencoba mengingatkan masyarakat untuk ikut serta menjaga lingkungan dan tidak lagi melakukan penanaman. Namun solusi bertahan hidup di musim kemarau belum ditemukan sehingga aktivitas penebangan oleh masyarakat terus berjalan.

Di Desa Wisata Pentingsari, identifikasi permasalahan dilakukan oleh seorang aktor lokal yaitu Bapak Doto Yogantoro. Pada tahun 1970an, Desa Pentingsari sudah banyak dikunjungi untuk tujuan wisata “kepercayaan”. Ketika peminat jenis wisata ini berkurang, potensi desa yang pernah menerima banyak kunjungan dimanfaatkan oleh Bapak Doto untuk mengembangkan kembali wisata desanya. Selain untuk tujuan mempersatukan warga, pariwisata dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan warga desanya. Desa Pentingsari pernah memperoleh predikat dusun miskin dengan tingkat ekonomi masyarakat yang relatif rendah [11].

2) Partisipasi dalam Identifikasi Potensi Pengembangan

Identifikasi potensi pengembangan pariwisata dilakukan oleh pemuda karang taruna bersama masyarakat. Hal ini dilakukan ketika mereka menyadari potensi yang mereka miliki karena kawasan GAP terlihat sangat hijau dan menarik. Hal ini juga didukung dengan kedatangan wisatawan lokal untuk melakukan pendakian di GAP, meskipun jumlahnya masih sangat sedikit. Mereka mencoba untuk mempublikasikan foto GAP melalui akun facebook dan berhasil menarik wisatawan lebih banyak. Karang taruna bersama masyarakat melakukan musyawarah untuk mengelola kegiatan wisata tersebut dengan sumber daya yang mereka miliki. Masyarakat mulai menetapkan tarif tiket masuk, menyediakan layanan parkir, pembukaan jalur pendakian, dan penyediaan gazebo di kawasan GAP. Upaya pemenuhan tersebut dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

Pasca gempa Jogja, pada tahun 2007 masyarakat kembali mengembangkan pariwisata dengan pendampingan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Masyarakat memperoleh sosialisasi dasar terkait pariwisata sebagai bekal awal seperti materi sadar wisata dan sapta pesona. Selanjutnya masyarakat membentuk Badan Pengelola Desa Wisata (BPDW) yang kemudian berubah menjadi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pengelola terdiri atas berbagai elemen masyarakat, yaitu pemuda, orang tua, petani, Ibu PKK, perangkat desa, serta perwakilan dari 5 dusun di Desa Nglanggeran. Kelompok inilah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pariwisata. Berdasarkan peran yang dimiliki, masyarakat memperoleh penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas mereka seperti pengelolaan destinasi wisata, pemanduan dan pengelolaan hasil pertanian. Berbagai pelatihan yang diberikan secara bertahap dan berkala, ternyata mampu meningkatkan kapasitas masyarakat. Pada tahun 2012, pembuatan tabungan air musim kemarau untuk supply air pertanian yang digagas oleh masyarakat berhasil dibangun dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi DIY. Setelah diresmikan pada tahun 2013, pertanian masyarakat tumbuh dengan baik. Embung tersebut juga menarik kunjungan wisata yang cukup tinggi sehingga daya tarik baru di kawasan embung juga dikembangkan. Paparan di atas menunjukkan bahwa partisipasi dalam identifikasi potensi pengembangan dilakukan oleh masyarakat bersama pengelola dan didampingi oleh pemerintah daerah. Di Desa Pentingsari, pemberdayaan masyarakat dalam identifikasi pengembangan daya tarik dilakukan secara bersama-sama. Masyarakat dan pengelola melakukan diskusi terkait potensi desa. Hasil yang diperoleh tersebut didokumentasikan oleh pengelola. Pengelola Desa Wisata Pentingsari juga dilakukan oleh Pokdarwis yang dibentuk berdasarkan musyawarah. Ketua Pokdarwis adalah Bapak Doto yang menjadi aktor lokal pengembangan desa. Pokdarwis melakukan studi ke berbagai desa wisata lainnya yang sudah berkembang baik. Berdasarkan hasil pembelajaran tersebut, pengelola melakukan seleksi dan evaluasi sehingga diperoleh beberapa daya tarik yang menurut pengelola paling sesuai dengan kondisi desa. Daya tarik tersebut berupa kehidupan sehari-hari masyarakat desa yang dikemas melalui paket-paket wisata, seperti kegiatan bertani, olahan kuliner, kegiatan kesenian dan tradisi lokal seperti kenduri. Sama halnya dengan Desa Nglanggeran, masyarakat Desa Pentingsari juga memperoleh berbagai pelatihan berdasarkan peran yang dimiliki. Berbagai pelatihan yang diberikan secara bertahap dan berkala dengan terus dievaluasi.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Tahap Implementasi

1) Partisipasi dalam Pelaksanaan Program Pengembangan

Pelaksanaan program pengembangan pariwisata dilakukan dalam hal pengembangan konsep desa wisata, pengembangan produk wisata yang meliputi daya tarik wisata; pengadaan fasilitas wisata; perbaikan akses dan pengembangan SDM. Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran dilakukan secara berkala termasuk pada tingkat partisipasi masyarakat. Bentuk kegiatan wisata yang awalnya fokus pada kawasan GAP dan berubah menjadi desa wisata berimplikasi pada peningkatan jumlah masyarakat yang terlibat. Konsep desa wisata menawarkan berbagai daya tarik yang beragam yang dapat dinikmati dalam kurun waktu tertentu seperti 2-10 hari. Konsep ini berhasil meningkatkan lama tinggal wisatawan. Partisipasi masyarakat dalam tahap juga meningkat dalam penyediaan homestay, fasilitas makan minum, fasilitas pemanduan,

pengemasan berbagai produk wisata baru seperti paket outbound, camping, trekking untuk sunrise, pertunjukan kesenian, edukasi olahan kakao, edukasi pertanian, edukasi peternakan etawa, dan sebagainya.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan wisata, Desa Nglanggeran memiliki agenda pertemuan rutin bulanan yang disebut “Selasa Kliwonan”. Pertemuan ini dilakukan setiap 30-35 hari di hari Selasa Kliwon, berdasarkan kalender Jawa. Pertemuan ini menjadi sarana bagi semua masyarakat untuk bersama-sama mengevaluasi kegiatan pariwisata ataupun kegiatan desa. Berbagai masukan akan ditampung dan didiskusikan bersama, termasuk kritik saran dari wisatawan yang dihimpun melalui buku tamu. Kegiatan wisata yang terus dikembangkan juga ditunjang dengan peningkatan kualitas SDM melalui berbagai program penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat. Pelatihan dilakukan berdasarkan kebutuhan dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, akademisi, NGO dan pihak swasta.

Desa Wisata Pentingsari memiliki konsep pengembangan yang hampir sama namun tidak pada aspek pengemasan produk. Sejak awal merintis kegiatan wisata, Pentingsari langsung menawarkan paket desa wisata. Tidak seperti Nglanggeran yang bermula dari single product. Sehingga pada tahap pelaksanaan, Desa Wisata Pentingsari sudah memiliki wisatawan dengan length of stay lebih dari satu hari. Hal ini berimplikasi pada penyerapan keterlibatan masyarakat secara cepat dalam penyediaan fasilitas homestay, penyediaan paket-paket edukasi dengan berbagai pendamping misalnya edukasi olahan jamur, edukasi membuat kerajinan, edukasi membuat batik, kegiatan pertanian, outbound, dan sebagainya.

Program evaluasi di Desa Pentingsari dilakukan tahunan, namun monitoring dilakukan secara rutin oleh pengelola desa wisata. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan wisata telah sesuai dengan permintaan wisata, salah satunya melalui catatan kritik dan saran dari wisatawan dalam buku tamu. Sementara dalam peningkatan kapasitas SDM pengelola pariwisata, pihak Desa Pentingsari juga melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, akademisi, dan pihak swasta. Masyarakat memperoleh pelatihan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Intensitas pelatihan juga dimonitoring supaya kebutuhan pelatihan dapat dipastikan terpenuhi.

2) Partisipasi dalam Pengelolaan Destinasi atau Usaha Terkait

Desa Nglanggeran mengakomodasi pemuda dalam organisasi karang taruna, mengakomodasi pengelola pariwisata dalam Pokdarwis, dan mengakomodasi pelaku usaha dalam berbagai kelompok usaha di bawah naungan BUMDes. Pengelolaan pariwisata dilakukan oleh Pokdarwis sesuai AD/ART dan struktur organisasi yang ditetapkan. Pengelolaan destinasi dilakukan oleh Pokdarwis yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan perwakilan dari 5 dusun. Pembentukan Pokdarwis dilakukan secara musyawarah. Reorganisasi dilakukan setiap 5 tahun melalui musyawarah. Dalam struktur organisasi Pokdarwis juga melibatkan Dinas Pariwisata DIY dan Kabupaten Gunungkidul sebagai pembina. Pelaksana teknis di destinasi wisata diserahkan kepada karang taruna, namun pada beberapa pos seperti pemanduan dan juru parkir dapat diisi oleh masyarakat yang telah ditetapkan. Dalam rangka memastikan pengelolaan destinasi serta usaha-usaha yang dikembangkan telah sesuai dengan rencana, dibentuk berbagai kelompok berdasarkan peran. Beberapa kelompok

tersebut, misalnya:

Tabel 1. Kelompok Usaha Desa Wisata Nglanggeran

Tahun	Kelompok Usaha	Jumlah
2011	Kelompok TKI Purna (sentra usaha)	50 orang
	Kelompok Pedagang	21 orang
2012	PKK Purba Rasa (penyedia kuliner)	55 orang
	Purba Wisma (kelompok <i>homestay</i>)	80 unit
	Kelompok Tani Kumpul Makaryo (edukasi pertanian)	100 orang
	Kelompok Ternak Purbaya (edukasi ternak kambing etawa)	15 orang
2017	Kelompok Purba Ayu Spa	20 orang
2020	Kelompok Griya Batik	Data tidak diperoleh

Masing-masing kelompok mengelola secara mandiri usaha mereka di bawah naungan BUMDes yang dikelola oleh masyarakat desa. Sehingga dalam pengelolaan destinasi dan usaha pendukung sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat. Kelompok usaha tersebut terbuka bagi seluruh dusun di Desa Nglanggeran, namun kegiatan wisata dan pengelolaan usaha masih terpusat pada 3 dusun yaitu Nglanggeran Wetan, Nglanggeran Kulon dan Gunungbutak.

Di Desa Pentingsari, pengelolaan destinasi dan usaha terkait terdapat sedikit perbedaan dengan Desa Nglanggeran. Desa Nglanggeran tidak memiliki banyak pemuda yang tinggal di desa sehingga pengelola dan pelaksana kegiatan wisata dan penyedia usaha pendukung dilakukan oleh Pokdarwis bersama masyarakat. Sedangkan beberapa pemuda yang masih tinggal di desa, bergabung dalam kelompok penyedia usaha. Sama halnya dengan Desa Nglanggeran, Desa Pentingsari juga memiliki kelompok atau organisasi berdasarkan jenis usaha, yaitu:

Tabel 2. Kelompok Usaha Desa Wisata Pentingsari

Kelompok Usaha	Jumlah
Kelompok Tani Pemuda	Data tidak diperoleh
Kelompok Tani Ikan	Data tidak diperoleh
Kelompok Tani Jamur	Data tidak diperoleh
Kelompok Tani Kopi Merapi	Data tidak diperoleh
Kelompok Ternak Sapi Perah	Data tidak diperoleh
Kelompok Membatik	Data tidak diperoleh
Kelompok Kuliner Lokal	60 orang
Kelompok Homestay	80 orang
Kelompok Seni dan Budaya	25 orang
Tenaga Keamanan	30 orang

Berbagai kelompok usaha dan keterlibatan masyarakat sebagai pendukung kegiatan wisata di bawah pengelolaan pengurus desa wisata. Hal ini berbeda dengan Desa Nglanggeran, karena cakupan Desa Wisata Pentingsari adalah dusun sehingga pengelolaan

banyak dilakukan oleh internal pengurus desa wisata. Pengurus Desa Wisata Pentingsari dipilih berdasarkan musyawarah, tetapi pilihan warga selalu kembali ke Pak Doto yang hingga kini masih menjadi ketua Pokdarwis.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penerimaan Manfaat

Pada tahap ini, tingkat partisipasi masyarakat dilihat melalui peran dan posisi masyarakat dalam memperoleh manfaat, dan dampak pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan lokal. Masyarakat Desa Nglanggeran dalam menerima manfaat pengembangan pariwisata dapat dilihat melalui peran yang diambil. Sebagaimana besar masyarakat terlibat sebagai penyedia jasa usaha pendukung. Bagi kelompok tani, pada mulanya mereka memiliki penghasilan utama dari bertani dan menjual hasil tani. Namun semenjak pariwisata berkembang, mereka dapat melakukan peningkatan nilai jual produk sebelum dipasarkan. Selain itu mereka juga memperoleh penghasilan tambahan apabila mereka memperoleh tamu yang memesan paket edukasi pertanian atau pengolahan produk mereka. Hal tersebut juga dirasakan oleh kelompok usaha lainnya. Pada kondisi seperti ini, masyarakat menerima manfaat pariwisata sebagai sumber pendapatan tambahan.

Perbedaan manfaat bisa dialami oleh masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan, misalnya pemuda dan TKI purna. Para pemuda banyak terlibat penuh dalam operasional pariwisata terutama di destinasi dan pemanduan. Loker penjualan tiket selalu dijaga oleh para pemuda secara shifting 24 jam agar terjadi pemerataan. Sistem ini juga mendukung agar para penjaga dalam kondisi prima saat bekerja. Hal ini salah satunya sebagai upaya antisipasi jika terjadi kondisi gawat darurat pada wisatawan, sehingga penjaga bisa melakukan pertolongan pertama secara maksimal. Sedangkan bagi purna TKI, perkembangan wisata di desa menjadikan mereka memiliki pilihan untuk pulang dan mencari pendapatan di desa. Para TKI purna rata-rata berperan sebagai penyedia homestay karena merupakan masyarakat yang memiliki cukup modal untuk melakukan penyesuaian rumah sesuai dengan standar homestay yang ditetapkan pengelola. Bagi pemuda dan TKI purna, perkembangan pariwisata menjadi sumber pendapatan utama mereka di Desa Nglanggeran. Namun seiring berkembangnya pariwisata, mereka tidak lagi bergantung pada pariwisata, beberapa di antaranya ikut bertani atau membuka usaha lain.

Selain manfaat langsung yang diterima masyarakat, kearifan lokal di Desa Nglanggeran terjaga melalui pengembangan pariwisata. Pengemasan potensi lokal sebagai bagian dari daya tarik wisata berhasil menciptakan apresiasi. Hal ini memberikan kemanfaatan seperti terjaganya kesenian lokal seperti gamelan; tradisi lokal seperti kirab dan kenduri; terjaganya kampung adat; kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai petani dan keberhasilan mengembangkan potensi pertanian lokal sebagai komoditas yang baik dan memiliki nilai lebih. Selain berkaitan dengan kondisi potensi desa, manfaat sosial sebagai hasil pengembangan wisata adalah penurunan jumlah TKI dan banyaknya jumlah pengangguran yang terserap dalam kegiatan wisata. Berbagai manfaat kegiatan pariwisata dari aspek pertumbuhan ekonomi, pelestarian sosial budaya, serta kondisi lingkungan yang terjaga dengan baik memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kesejahteraan masyarakat secara kolektif menjadikan hubungan baik antar elemen masyarakat terjaga baik.

Meskipun dusun yang digunakan sebagai tempat aktivitas wisata masih terbatas pada 3 dusun, namun pihak pengelola desa tetap mendorong keterlibatan masyarakat dari 5 dusun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengembangan produk yang terus

dilakukan. Saat ini Desa Wisata Nglanggeran sedang mengerjakan glamping di Kedung Kandang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan terutama dari mancanegara. Pengembangan ini juga diharapkan dapat menyerap lebih banyak lagi masyarakat yang saat ini belum terlibat aktif dalam kegiatan pariwisata. Selain itu, pihak Pokdarwis juga secara rutin memberikan bantuan dana segar terutama bagi dusun yang keterlibatan masyarakat masih terbatas. Hal ini diharapkan dapat membantu dusun sekaligus sebagai stimulus keterlibatan masyarakat.

Di Desa Pentingsari, bentuk penerimaan manfaat oleh masyarakat juga terdiri dari beberapa jenis. Mayoritas masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Dalam kegiatan pariwisata, masyarakat terlibat dalam penyediaan paket-paket wisata dan fasilitas penunjang pariwisata. Karena bentuk wisata yang ditawarkan Desa Pentingsari adalah paket live in, maka semua produk dijual dalam paket sekaligus fasilitas homestay dan konsumsi. Dalam penyediaan paket kuliner, masyarakat berperan untuk melakukan pengolahan produk sekaligus mengedukasi wisatawan yang belajar. Hal tersebut juga berlaku bagi paket edukasi lainnya. Semua paket wisata selain didampingi oleh seorang pemandu juga akan ditemani pemandu edukasi berupa kelompok pengelola paket yang dipesan. Keterlibatan masyarakat Desa Pentingsari dalam kelompok-kelompok mencapai 70% [11]. Sama halnya dengan Desa Nglanggeran, pariwisata memberikan manfaat sebagai sumber penghasilan tambahan. Sementara penghasilan utama dari kegiatan pertanian.

Dalam pengembangan pariwisata, beberapa masyarakat yang belum memiliki pekerjaan juga bergabung dalam menyediakan produk dan fasilitas. Hal ini menjadikan pariwisata sebagai sumber penghasilan utama mereka. Menurut penuturan Ketua Pokdarwis Desa Pentingsari, pendapatan masyarakat dalam kegiatan wisata bisa mencapai ± Rp 2.500.000 per orang. Penghasilan tersebut bahkan lebih tinggi dari UMR Kabupaten Sleman. Keberhasilan pariwisata dalam memberikan manfaat ekonomi serta sosial berupa terjaganya kerukunan warga menjadikan pengelola lebih hati-hati mengembangkan kegiatan wisata.

Kegiatan pariwisata yang dilakukan dengan pengendalian dan monitoring berkala berdampak positif bagi lingkungan maupun kondisi sosial budaya masyarakat. Bahkan Desa Wisata Pentingsari memiliki divisi lanskap yang bertugas untuk memastikan kesesuaian pengembangan dengan kondisi lingkungan. Oleh karenanya, meskipun pariwisata terus berkembang kondisi lingkungan tetap terjaga. Sementara dari aspek sosial budaya, pariwisata memberikan manfaat pada kelestarian kesenian lokal masyarakat seperti gamelan dan kegiatan tradisional berupa kenduri. Dalam rangka menjaga kualitas pelayanan, mengantisipasi kerusakan lingkungan dan dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat, pengelola melakukan batasan kunjungan wisata. Pokdarwis beserta masyarakat telah melakukan kesepakatan untuk menjaga stabilitas kegiatan wisata dan tidak ingin melakukan pengembangan yang berarti. Selain masyarakat sudah merasa ideal dan cukup dengan kondisi saat ini, masyarakat tidak ingin desanya terlalu penuh dan ramai wisatawan.

Tabel 3. Komparasi Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Nglanggeran dan Desa Wisata Pentingsari

Partisipasi	Bentuk	Nglanggeran	Pentingsari
Partisipasi dalam Perencanaan	Identifikasi Masalah	• Pemuda Karang Taruna menyusun upaya konservasi untuk menjaga debit air & menghijaukan kawasan GAP	• Pengelola mengisi untuk membangkitkan kembali wisata desa
	Identifikasi Pengembangan Potensi	• Masyarakat bermusyawarah untuk menyusun rencana pengelolaan pariwisata • Pengadaan fasilitas wisata secara swadaya • Menyiapkan SDM dengan pendampingan pemerintah daerah • Karang taruna dan masyarakat membentuk Pokdarwis • Pertemuan rutin bulanan sebagai wadah berdiskusi oleh masyarakat	• Masyarakat dan pengelola bermusyawarah untuk mengidentifikasi potensi daya tarik desa • Pengelola melakukan studi ke destinasi wisata lain yang menggunakan konsep wisata desa • Pengelola menyiapkan SDM dengan pendampingan pemerintah • Implementasi konsep, uji coba dan evaluasi daya tarik secara bertahap oleh masyarakat
Partisipasi dalam Implementasi	Pelaksanaan Program Pengembangan	• Pengembangan produk/ daya tarik dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. • Pengemasan daya tarik dalam paket-paket wisata sesuai potensi masyarakat. • Optimalisasi paket <i>live in</i> dengan penyediaan paket dan fasilitas oleh	• Pengembangan produk/ daya tarik dilakukan dengan mengevaluasi daya tarik eksisting dan meningkatkan kualitas pelayanan • Pembangunan fasilitas dilakukan dengan skema swadaya masyarakat serta dengan skema bantuan pemerintah dan CSR dari pihak swasta.

		masyarakat di bawah koordinasi Pokdarwis • Pembangunan fasilitas dilakukan dengan skema swadaya masyarakat serta dengan skema bantuan pemerintah dan CSR dari pihak swasta. • Peningkatan kapasitas masyarakat yang terlibat dalam pariwisata melalui penyuluhan dan pelatihan dengan melibatkan pemerintah, akademisi, NGO dan pihak swasta.	• Peningkatan kapasitas masyarakat yang terlibat dalam pariwisata melalui penyuluhan dan pelatihan dengan melibatkan pemerintah, akademisi, NGO dan pihak swasta. Intensitas pelatihan dimonitoring berkala oleh pengelola.
	Pengelolaan Destinasi atau Usaha Terkait	• Pengelola pariwisata adalah Pokdarwis yang dibentuk melalui musyawarah bersama. Anggota Pokdarwis berasal dari berbagai elemen masyarakat dan perwakilan 5 dusun. Reorganisasi setiap 5 tahun. • Kelompok usaha di bawah naungan BUMDes • Pengembangan produk dengan menambah pos-pos usaha sesuai potensi desa dan masyarakat yang tergabung dalam kelompok-kelompok usaha yang dikelola masing-masing kelompok. • Pelaksana kegiatan di destinasi dan penjagaan loket dilakukan oleh karang taruna secara <i>shifting</i> untuk menyerap banyaknya pemuda desa dan dibantu	• Pengelola pariwisata adalah Pokdarwis yang dibentuk melalui musyawarah bersama • Kelompok usaha di bawah naungan Pokdarwis • Pengembangan produk juga berada di bawah pengelolaan Pokdarwis bersama masyarakat • Pelaksana kegiatan adalah masyarakat, jumlah pemuda sangat terbatas

		tenaga teknis sesuai pos usaha	
Partisipasi dalam Menerima Manfaat		• Masyarakat menerima manfaat pariwisata sebagai sumber pendapatan tambahan bagi petani/peternak yang bergabung dalam kelompok usaha • Masyarakat menerima manfaat pariwisata sebagai sumber pendapatan tambahan bagi pemuda yang belum bekerja dan TKI purna yang kembali ke desa • Keterlibatan belum menyeluruh karena kegiatan wisata terkonsentrasi pada 3 dusun, namun telah didorong partisipasi aktif dari 5 dusun dengan melakukan pengembangan produk dan memberikan stimulus ke dusun melalui kas Pokdarwis	• Masyarakat menerima manfaat pariwisata sebagai sumber pendapatan tambahan bagi petani yang bergabung dalam kelompok usaha • Masyarakat menerima manfaat pariwisata sebagai sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat yang belum bekerja dan masyarakat rantau yang pulang dari kota • Keterlibatan masyarakat hampir menyeluruh dengan pendapatan $\pm$ Rp 2.500.000,- per orang per bulan, di atas UMR Kab. Sleman • Masyarakat sudah merasa cukup menerima manfaat sehingga dilakukan upaya stabilisasi dengan mengendalikan jumlah wisatawan.

KESIMPULAN

Bentuk pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran dan Pentingsari dilakukan dalam tahap perencanaan, implementasi dan penerimaan manfaat pariwisata. Dalam tahap perencanaan dilihat dari bentuk identifikasi masalah dan identifikasi potensi pengembangan desa wisata. Di Desa Nglanggeran, pada tahap identifikasi masalah dilakukan oleh pemuda karang taruna desa, sementara dalam identifikasi potensi pengembangan dilakukan oleh pemuda karang taruna bersama masyarakat desa. Terdapat perbedaan pada tahap identifikasi masalah yang dilakukan oleh seorang aktor lokal yang selanjutnya menjadi ketua Pokdarwis, sedangkan identifikasi potensi pengembangan dilakukan bersama masyarakat.

Dalam tahap implementasi atau pelaksanaan, pemberdayaan masyarakat dilihat melalui bentuk pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan destinasi serta usaha terkait. Di Desa Nglanggeran, pelaksanaan program sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat di bawah koordinasi Pokdarwis dan BUMDes. Pengelolaan destinasi dilakukan oleh Pokdarwis (yang terdiri atas berbagai elemen masyarakat dan perwakilan 5 padukuhan) dan kelompok-kelompok usaha secara mandiri mengelola usaha mereka di bawah naungan BUMDes, sementara pelaksana kegiatan wisata dilakukan oleh kelompok karang taruna dibantu pos-pos usaha terkait. Seluruh pelaksanaan dimonitoring dan dievaluasi secara berkala oleh seluruh masyarakat melalui pertemuan rutin bulanan dan tahunan. Sementara di Desa Pentingsari, pelaksanaan program pengembangan sepenuhnya dilakukan oleh pengelola bersama masyarakat. Pengelolaan destinasi dan usaha terkait, semuanya berada di bawah naungan Pokdarwis karena cakupan desa wisata adalah padukuhan. Pelaksanaan juga dimonitoring dan dievaluasi secara berkala.

Bentuk penerimaan manfaat oleh masyarakat dilihat melalui peran dan posisi masyarakat dalam keterlibatannya di kegiatan pariwisata. Masyarakat di Desa Nglanggeran maupun Pentingsari memperoleh manfaat secara ekonomi baik sebagai sumber pendapatan utama maupun sumber pendapatan tambahan. Manfaat lain yang diperoleh berupa pelestarian kearifan lokal baik dalam aspek sosial, budaya dan lingkungan. Berbagai kemanfaatan tersebut berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Desa Nglanggeran yang memiliki jumlah penduduk jauh lebih banyak belum dapat mendorong keterlibatan masyarakat secara menyeluruh. Pengelola terus berupaya meningkatkan jumlah keterlibatan masyarakat dengan pengembangan produk wisata dan pemberian dana stimulus ke padukuhan dari kas Pokdarwis. Sementara di Desa Pentingsari, keterlibatan masyarakat hampir sudah menyeluruh dengan tingkat pendapatan rata-rata di atas UMR Kabupaten Sleman. Oleh karenanya masyarakat merasa cukup dan menghendaki stabilisasi pengelolaan pariwisata agar tidak dilakukan pengembangan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2019). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- [2] Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. (2010). Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata melalui Desa Wisata.
- [3] Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2012). Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Jakarta.
- [4] Dinas Pariwisata DIY. (2014). Laporan Akhir Kajian Pengembangan Desa Wisata di DIY, Dinas Pariwisata DIY.
- [5] Jumlah Desa Wisata Layak Jual DIY diperoleh melalui situs internet http://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/cetak/211-pariwisata. Diakses pada 8 Mei 2020.
- [6] Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- [7] Najiyati, S., Asmana, A., Suryadiputra, I. (2005). Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada, Bogor.
- [8] Profil Desa Nglanggeran diperoleh melalui situs internet <http://gunungapipurba.com/pages/detail/informasi-geografis>. Diakses pada 8 Mei 2025.
- [9] Profil Desa Pentingsari diperoleh melalui situs internet <https://cangkringankec.slemankab.go.id/artikel/>. Diakses pada 8 Mei 2025.
- [10] Hendrarso, E.S. (2005): Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar. Dalam Suyanto, B & Sutinah (Ed), Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, Prenadamedia Group, Jakarta.
- [11] Ardika, I Gede (2018): Kepariwisata Berkelanjutan: Rintis Jalan Lewat Komunitas, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- [12] Green Destinations (2019): 2019 Sustainable Destinations Top 100, Press Release, Netherlands.